



PEMKOT TENGAH SIAPKAN FORMULASI BARU Persoalan Sampah, DPRD Yogya Imbau Tak Saling Menyalahkan

YOGYA (KR) - Dalam sepekan ini terutama usai libur sekolah tumpukan sampah di berbagai depo kembali dijumpai setelah beberapa bulan berhasil dinormalisasi. Kalangan DPRD Kota Yogya pun mengimbau seluruh pihak agar tidak saling menyalahkan.

Ketua DPRD Kota Yogya Wisnu Sabdono Putro, mengungkapkan sejatinya pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Baik dari pihak masyarakat maupun kalangan usaha yang memproduksi sampah, hingga pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik.

"Justru pada masa-masa seperti ini kita semua harus bisa bekerja sama agar permasalahan sampah bisa segera teratasi. Jangan kok saling menyalahkan, karena ini tanggung jawab kita sebenarnya," urainya, Minggu (20/7).

Benih permasalahan sampah di Kota Yogya sebenarnya sudah terjadi beberapa dekade sebelumnya. Pemerintahan saat ini pun memiliki tugas cukup berat dalam menjaga supaya darurat sampah tidak kembali terjadi. Upaya juga sudah dilakukan dengan pemanfaatan teknologi seperti insinerator. Akan tetapi seiring keterbatasan kapasitas serta beban anggaran daerah, maka penambahan peralatan sudah tidak memungkinkan dilakukan. Ditambah tempat pengelolaan sampah yang sebe-

lumnya digunakan oleh Kota Yogya, kini turut mulai melakukan pembatasan.

Oleh karena itu, imbu Wisnu, dirinya mendorong eksekutif untuk memaksimalkan pola kerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama itu pun bisa dibalut dengan skema investasi agar saling menguntungkan. Kemudian di tingkat rumah tangga, komitmen untuk melakukan pemilahan harus terus dilakukan. Apalagi jumlah bank sampah saat ini sudah merata di tiap wilayah.

"Begitu juga di tingkat penggerobak atau transporter juga harus konsisten. Kami di lembaga dewan juga akan mengkaji regulasi yang dibutuhkan. Jadi semua harus bergerak bersama-sama dan saling mendukung," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Sinarbiyat Nujanat, juga mengungkapkan hal sama. Menurutnya sempat ada wacana penempatan insinerator di tiap kelurahan. Akan tetapi tidak semua wilayah memiliki lahan memadai, di samping kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga upaya penambahan insinerator juga sulit diwujudkan di tengah beban anggaran yang sedang tinggi.

Sehingga dirinya juga mendorong pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah melalui skema kerja sama. Apalagi beberapa daerah juga banyak

melibatkan peran swasta. "Tidak semua harus dibebankan melalui APBD. Saya kira swasta juga banyak yang tertarik untuk bisa berinvestasi dalam hal pengelolaan sampah," katanya.

Sementara Walikota Yogya Hasto Wardoyo, mengaku tengah menyiapkan formula baru dalam mengatasi persoalan sampah yang kembali menumpuk. Salah satu yang mulai dilakukan ialah pemilahan di tingkat depo. Saat ini terdapat empat depo yang dijadikan percontohan dalam hal pemilahan yakni depo di Jalan Brigiend Katamso, depo Lapangan Karang, depo Kotabaru dan depo Mandala Krida. Di samping itu, dirinya juga terus meminta penggerobak tetap konsisten dalam memisahkan plastik dan residu sebelum disetorkan ke depo.

Terkait kerja sama dengan swasta, menurut Hasto banyak pihak swasta yang bergerak di sektor pengolahan sampah di luar daerah sudah tidak dapat diandalkan kembali oleh Pemkot Yogya. Hal ini karena para pemilik teknologi insinerator atau mesin pembakar sampah yang akhir-akhir ini berhenti beroperasi akibat penertiban terkait penyesuaian kaidah lingkungan.

"Di masa kritis semacam ini, harus ada cara-cara baru, jurus baru atau formula baru. Dalam seminggu sampai sebulan ini, saya berpikir keras untuk mencari cara-cara baru," akunya. **(Dhi-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005